

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS PERUBAHAN IKLIM (Studi Kasus Di Kabupaten Mukomuko)

Weri Tri Kusumaria

Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email : werykusuma@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Nasional Tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim (Studi Kasus di Kabupaten Mukomuko). Bagaimana model keterpaduan pengaturan Kebijakan Nasional Tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim (Studi Kasus di Kabupaten Mukomuko)? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan kebijakan nasional terhadap pengelolaan hutan kurang sejalan dengan Peraturan pemerintah Daerah mukomuko yang masih jauh dari sinergi dalam upaya melaksanakan kebijakan perubahan yang lebih baik lagi. Hambatan pengaturan kebijakan nasional terhadap pengelolaan hutan berbasis perubahan iklim antara lain: Proses komunikasi berjalan kurang optimal, kegiatan Forkom di tingkat Kabupaten juga belum mampu menampung aspirasi masyarakat. Ditingkat Dasar masih ada miskomunikasi dari beberapa stacholder dan Sumberdaya Manusia yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan belum mencukupi. Pada keterpaduan kebijakan nasional dan aspek struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan masih terkesan top-down dikarenakan kurangnya sinergi antara pemerintahan provinsi dan kabupaten.

Kata Kunci: *Perubahan Iklim, Kebijakan Nasional, Pengelolaan Hutan*

Abstract: This study aims to determine the implementation of the National Policy on Forest Management Based on Climate Change (Case Study in Mukomuko). What is the model for integrating the National Policy on Climate Change-Based Forest Management (Case Study in Mukomuko)? This research uses an empirical juridical approach. Qualitative approach method, where research is expected to produce descriptive data in the form of written or oral data from people and observable behavior. This study concludes that the national policy regulation on forest management is not in line with the mukomuko regional government regulation which is far from synergizing in an effort to implement a better change policy. The obstacles in regulating national policies on climate change-based forest management include: The communication process is running less than optimal, Forkom activities at the district level also have not been able to accommodate the aspirations of the community. At the Basic level there is still miscommunication from several stacholders and Human Resources that are used in the implementation of policies can be said to be inadequate. In the integration of national policies and aspects of the bureaucratic structure, the implementation mechanism is still impressed top-down due to the lack of synergy between provincial and district governments.

Keywords: *Climate Change, National Policy, Forest Management*

Pendahuluan

Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat di satu sisi telah meningkatkan kualitas hidup manusia terutama aspek perekonomian, namun seiring dengan hal tersebut, dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan tidak dapat dihindarkan. Pemanfaatan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan menjadi permasalahan, manakala sumberdaya yang ada digunakan secara maksimal tanpa memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat,¹ kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara dalam arti bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi, namun dibatasi oleh kedaulatan negara lain,² serta memiliki tujuan dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan dan tanggung jawab tersebut, Indonesia telah menyusun suatu perencanaan pembangunan nasional sejak tahun 1956 dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. Namun pada periode awal kemerdekaan tahun 1967, pembangunan mengalami kegagalan pelaksanaan disebabkan karena tidak stabilnya politik dalam negeri.³

Pada masa awal reformasi, pemerintah mengubah skema sistem perencanaan pembangunan dari Repelita menjadi skema program pembangunan nasional melalui propenas tahun 2000-2004 sebagai kebijakan yang secara rinci dan terukur disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pada tahun 2004⁴ program pembangunan nasional kembali di ubah menjadi sistem perencanaan pembangunan nasional.⁵ yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara.

Pembangunan nasional disatu sisi yang telah dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya, kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, poli-

tik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumberdaya alam (SDA),⁶ namun disisi lain perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam proses pembangunan secara tidak langsung telah memacu peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sehingga mulai mengganggu tata kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁷

Salah satu dampak pembangunan yang harus dihadapi saat ini adalah pemanasan global yang tidak hanya berdampak pada bangsa Indonesia, namun berdampak pada seluruh umat manusia. Pemanasan global yang menaikkan suhu permukaan bumi sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan iklim.⁸

Dampak perubahan iklim antara lain adalah turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersedianya berbagai penyakit hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.⁹

dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia adalah penantang yang paling keras. dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS: Al-baqarah :204-205).¹⁰

¹Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum, Binacipta (Putra A Bardin, Cetakan ke-9, 1999), h. 11-13

²Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994, h. 9, lihat juga Soehino, Ilmu Negara, (liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 1993), h. 154-156

³Soeharto (Presiden Republik Indonesia Kedua), Pidato Kenegaraan Republik Indonesia di depan sidang DPR-GR, pada tanggal 16 Agustus 1968, h. 9 <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/pidato-ke-hegaraan-tahun-1968/?&kid=1413242931> 14/10/2017

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

⁵Undang-Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁶Bab II Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

⁷M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan, ...h. 11

⁸Otto Soemarwoto, Aturdirisendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah Mada University Press, Cetakan Ketiga, 2004), h. 60

⁹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Pada ayat ini sudah jelas bahwa Allah telah memperingatkan tentang kerusakan yang terjadi di alam dunia ini, baik di darat, laut maupun udara adalah akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Kerusakan di darat seperti rusaknya hutan, hilangnya mata air, tertimbunnya danau-danau penyimpan air, lenyapnya daerah-daerah peresap air hujan dan sebagainya. Kerusakan di laut seperti pendangkalan pantai, menghilangkan tempat-tempat sarang ikan, pencemaran air laut karena tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Allah memperingatkan itu, karena dampak negatifnya akan dirasakan manusia itu sendiri.

Dalam memenuhi komitmennya terhadap dunia internasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).¹¹

Berdasarkan rencana aksi penurunan emisi GRK, bidang kehutanan merupakan sektor yang diarahkan dalam upaya mitigasi perubahan iklim global dengan mempertahankan fungsi hutan untuk penyerapan karbon, sedangkan sektor non kehutanan pemerintah harus mengarahkan kebijakannya dalam upaya menekan sumber emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim.

RAN-GRK sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK dan Pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK). Pelaksanaan RAN-GRK menggunakan pendekatan partisipatif, dimana keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menyusun RAD-GRK untuk pencapaian target penurunan emisi GRK diseluruh Indonesia.¹²

Perencanaan pembangunan Indonesia berkaitan dengan berbagai peraturan khususnya berkenaan dengan lingkungan dan penataan ruang, hal tersebut dirumuskan dalam kewajiban pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tataran penerapan, KLHS wajib diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM Nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Permasalahan lainnya perencanaan tata ruang sebagai instrument pengendali untuk memastikan hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan, salah satunya masalah tenurial, konflik kepemilikan kawasan dan konversi hutan untuk kegiatan perkebunan dan tambang menjadi tidak terkendali.¹³

Konflik ini semakin sulit ditangani secara cepat dan tuntas disebabkan ketidakjelasan status hutan dan tata batas.

Dalam konteks nasional, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, pengendalian dan penanganan perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi Negara, namun sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan. Dengan demikian komitmen Negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional.¹⁴

Seluas 72 ribu hektare wilayah Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu atau mencapai 41 persen dari luasan daerah itu dikuasai sembilan perusahaan perkebunan skala besar. Area peruntukan lain mencapai 175 ribu hektare, seluas 72 ribu atau 41 persen diberikan kepada perkebunan skala besar. Dari luasan Area Peruntukan Lain (APL) 175 ribu hektare tersebut, sebanyak 172

¹³Surat Al-Baqarah ayat 204-205

¹⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas rumah Kaca (RAN-GRK).

¹⁵Bappenas, Potret Aksi Di daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), Januari 2014

¹⁶Marilang, "Keadilan antara Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang", Jurnal AL-FIKR Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, h. 5

ribu jiwa masyarakat memanfaatkan lahan seluas 102 ribu hektare. Total luas kawasan kabupaten yang berbatasan dengan provinsi tetangga Sumatera Barat itu mencapai 4.037 kilometer persegi. Dari luasan tersebut, 43 persen merupakan APL dan 57 persen kawasan hutan atau mencapai 228 ribu hektare yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, cagar alam, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi.¹⁵

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 131.341 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar.¹⁶

Pembahasan

1. Gambaran Pelaksanaan Pengaturan Kebijakan Nasional Dan Daerah Terhadap Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation-REDD+) merupakan dua pendekatan baru dalam pengelolaan hutan Indonesia. Bila pasar karbon berjalan sesuai rencana dunia internasional, maka kedua pendekatan tersebut bila digabungkan berpotensi memberikan tambahan insentif bagi pengelola KPH dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

REDD+ dan KPH sama pentingnya bagi Indonesia dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. KPH merupakan unit pengelola hutan terkecil, sehingga ada kejelasan penanggung jawab atau pengelola hutan di tingkat tapak. Pemerintah Indonesia, khususnya

Kementerian Kehutanan, sangat yakin bahwa KPH akan menjadikan hutan Indonesia terjaga kelestariannya dan dapat menjamin manfaat hutan bagi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar wilayah KPH. Karenanya Kementerian Kehutanan sangat berkepentingan menjadikan KPH segera beroperasi.

Sebagai inisiasi yang relatif baru dalam pengelolaan hutan Indonesia, KPH perlu disiapkan untuk dapat beroperasi dengan baik dan sekaligus mengambil manfaat dari REDD+. Tulisan ini akan memberikan gambaran umum tentang KPH di Indonesia khususnya Kabupaten Mukomuko dan membahas lebih detail potensi, kendala, serta persiapan yang perlu dilakukan untuk menjalankan REDD+. Tiga KPH Model akan dijadikan sebagai contoh gambaran nyata potensi dan peluang pelaksanaan REDD+ dalam pengelolaan KPH. Ketiga KPH dimaksud sebagai Contoh adalah KPH Produksi (KPH) Batulanteh di Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPH Lindung (KPHL) Sunjung di Provinsi Sumatera Barat, dan KPHWae Sapalewa di Provinsi Maluku.

KPH dapat dikelola secara efisien dan lestari, menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai in dan/atau dikelola sendiri pemanfaatannya, melalui kegiatan yang direncanakan dan dalankan sendiri Dengan demikian, KPH berpotensi mensukseskan pengelolaan hutan karena ada kejelasan institusi pengelolaan hutan di level tapak, dapat mengkoordinasikan berbagai kepentingan antar wilayah administratif, dan mengintegrasikan berbagai fungsi hutan yang berbeda.

Pentingnya peran KPH tersebut, menjadikan KPH tercatat dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) sebagai prioritas nasional dalam mencapai kelestarian hutan. REDD+ merupakan mekanisme pemberian insentif dari negara maju kepada negara-negara sedang berkembang yang mampu menurunkan emisinya. REDD+ mensyaratkan tata kelola yang baik dan

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

¹⁵<https://bengkulu.antaranews.com/perkebunan/sawit/kuasai-41-persen-luas-mukomuko> (di akses tanggal 23 Mei 2018 Pukul 10.00)

¹⁶Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032

menekankan pada kelestarian hutan serta memberi perhatian penuh pada hak dan kesejahteraan masyarakat. Dunia internasional memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat diperhitungkan dalam mensukseskan REDD+. Mereka melihat upaya serius Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Komitmen Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Conference of Parties (COP) ke-15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi hingga 26% pada tahun 2020 dengan biaya sendiri atau 41% dengan bantuan internasional, dibentuknya Badan Pengelola REDD+ di tingkat nasional dan Pokja REDD+ di tingkat sub-nasional, dibuatnya Sistem Informasi Safeguard (SIS) Indonesia, dikeluarkannya berbagai peraturan terkait dengan REDD+ dari Kementerian Kehutanan dan dari Gubernur, banyaknya area demonstrasi REDD+ (Demonstration Activity - DA-REDD+) di Indonesia sebagai bahan pembelajaran REDD+, merupakan beberapa contoh tindakan nyata untuk mensukseskan REDD+ dan patut dihargai.

Untuk dapat sukses dalam menjalankan REDD+, Indonesia menetapkan fase 'REDD+ Readiness' atau 'fase persiapan' guna menyiapkan berbagai aspek teknis, kelembagaan, dan sosial di level nasional dan sub-nasional sebelum memasuki fase pelaksanaan penuh REDD+. Berbagai dukungan dana dari luar masuk ke Indonesia untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam fase ini. Salah satu dukungan dana berasal dari FCPF (Forest Carbon Partnership Facility), yang sebagian dananya digunakan untuk pemberdayaan beberapa Pemda dan KPH yang menunjukkan minatnya untuk melaksanakan REDD+.

Setelah diselenggarakannya COP 13 di Bali pada tahun 2007, REDD+ menjadi bahan diskusi banyak pihak di Indonesia. Meski REDD+ telah berproses selama lebih dari 5 (lima) tahun dan melibatkan banyak pihak di level nasional dan sub nasional, serta mendapat dukungan dana dan tenaga dari luar, masih banyak pemangku ke-

pentingan yang kurang faham tentang mekanisme ini, khususnya mereka yang ada di tingkat sub-nasional. Masyarakat Kabupaten Mukomuko dan KPH bahkan belum pernah mendengar istilah REDD+.

2. Hambatan Pengaturan Kebijakan Nasional Dan Daerah Terhadap Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim

Implementasi yang terdapat di kabupaten mukomuko menurut Edward III (1980) menyatakan bahwa ada 4 (empat) kondisi yang diperlukan agar suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- (1) Komunikasi,
- (2) Sumber daya,
- (3) Disposisi, dan
- (4) Struktur birokrasi.

Dalam mencapai keberhasilan implementasi atau pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan organisasi maka peran pimpinan sangat menentukan. Salah satu fungsi administrasi publik adalah pelaksanaan (implementing), disamping perencanaan (planning), dan evaluasi (evaluating). Sedangkan untuk mencapai implementasi kebijakan yang secara efisien dan efektif ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang terdapat di Kabupaten Mukomuko. Dalam implementasi dapat disebabkan oleh belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan serta pengelola kawasan industri.

Pemda Mukomuko koordinasi tidak terlepas dari aspek kontrol, karena agar koordinasi dapat berjalan dengan efektif maka perlu dilakukan kontrol atas koordinasi yang telah dilakukan tersebut. Oleh karena itu maka Pemda menjelaskan bahwa koordinasi kadang-kadang juga dikenal sebagai kontrol meskipun menurut dia istilah ini sudah jarang digunakan atau telah menjadi usang di banyak kalangan usaha organisasi dalam mencapai koordinasi dan kontrol secara formal dilakukan melalui dua cara yaitu:

Pertama, vertically, yaitu kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui mekanisme komando, supervisi, kebijakan, aturan, perencanaan, sistem kontrol.

Kedua, laterally, yaitu kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat, gugus tugas, standing committee, peranan koordinator khusus, atau struktur matriks. Menyangkut peranan seseorang dalam melakukan koordinasi dalam suatu organisasi.

Menurut Berger¹⁷ dalam kaitannya dengan pengelolaan perubahan dalam organisasi, terdapat proses perubahan yang saling menguatkan menyangkut:

- 1) commitment(motivation),
- 2) coordination(behavior), dan
- 3) competence (Skill).

Pembelajaran dari berbagai DA-REDD+ menunjukkan perlunya dilakukan seleksi lokasi untuk meminimalkan resiko kegagalan. Beberapa dasar pertimbangan dalam pemilihan lokasi untuk REDD+ .

1. Tutupan hutan yang masih luas dengan kepadatan karbon dan indeks keragaman hayati yang masih cukup tinggi
2. Ancaman terhadap hutan atau penyebab penggundulan hutan yang relatif mudah dikenali;
3. Kesiapan dan komitmen politik Pemerintah tempat diseleng- garakannya REDD+;
4. Batas wilayah yang jelas
5. REDD+ di daerah tersebut bisa bermanfaat banyak bagi warga;

Kabupaten Mukomuko secara devinitif lepas dari Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2003. Berdasarkan perda tata ruang nomor 6 tahun 2012, 53% dari 403.670 hektar luas kabupaten Mukomuko merupakan kawasan hutan. 131.341 hektar diantaranya merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. 511,49 hektar kawasan Cagar Alam, 71.135 hektar Hutan Produksi Terbatas, dan 11.845 hektar Hutan

Produksi Tetap.

Namun fakta menunjukkan kawasan hutan tersebut telah rusak. Kerusakan itu dipengaruhi oleh semakin masif nya penerbitan izin HGU perkebunan skala besar. Berdasarkan analisis yang dilakukan Genesis Bengkulu¹⁸ bahwa 41% kawasan APL Mukomuko dikuasai oleh 9 perusahaan perkebunan skala besar. Beberapa modus juga dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menguasai kawasan hutan. Seperti kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh PT. Agromuko pada tahun 2011. PT Agromuko adalah anak perusahaan SIPEF Group. Perusahaan kelapa sawit ini juga menjadi suplier perusahaan terbesar di dunia Wilmar Group. Pada tahun 2000 PT Agromuko melakukan penanaman kemudian 2008 Agromuko masuk ke dalam kawasan HPT Air Majunto dan melakukan landclearing serta penanaman. Luasan kawasan yang di rambah seluas 1215 ha. Tahun 2012 pelepasan kawasan kawasan HPT menjadi APL. Perusahaan ini juga melakukan perampasan lahan masyarakat. Saat ini luasan kawasan Agromuko 23.015 ha.

3. Gambaran Keterpaduan Pengaturan Kebijakan Nasional Dan Daerah Terhadap Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Perubahan Iklim

Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh perusahaan skalan besar ini semakin merampas ruang kelola rakyat. Alhasil, untuk bertahan hidup akhirnya rakyat menduduki kawasan hutan. Perebutan sumber-sumber penghidupan ini memposisikan rakyat menjadi pihak yang salah karena telah masuk dan mengelola kawasan hutan milik Negara.

Atas kenyataan itu, Genesis Bengkulu bersama-sama dengan rakyat yang hidup dipinggiran hutan di kabupaten Mukomuko berusaha merebut ruang kelola tersebut. Karena sesungguhnya Rakyat berhak untuk mengelola kawasan hutan sebagai

¹⁷Mery Lou Roberts dan Paul D Berger (1998). Direct Marketing. Management. Prentice Hall Englewood Clift. Drs. H. Indriyo Gitosudarmo, M. Com (Hons) (1994).h 232

¹⁸hasil wawancara direktur Genesis Hari Kamis tanggal 18 Januari 2019 Pukul 10.00-12.00 WIB

sumber penghidupannya. Usaha perebutan ruang kelola tersebut dilakukan di dua desa, yaitu desa Lubuk Silandak, kecamatan Teramang Jaya dan desa Bukit Makmur, kecamatan Penarik.

Desa Lubuk Silandak Kecamatan Teramang Jaya

Desa Lubuk Silandak memiliki luas \pm 5000 Ha, dengan jumlah kk sebanyak 169 dan 576 Jiwa. Didesa lubuk silandak terdapat lebih kurang 110 bangunan rumah, desa ini sudah memiliki fasilitas umum antara lain: Polindes, Masjid, PAUD, SD dan Puskesmas-des. Permasalahn yang dihadapi oleh masyarakat Lubuk Silandak yaitu terkait dengan status kawasan yang menjadi tempat usaha dalam menyambung hidup.

Desa Lubuk Silandak ini merupakan merupakan desa perintis dalam pemekaran desa pada tahun 2007 dan sekarang dipimpin oleh kepala desa seorang perempuan Ibuk Nurilis “Di desa Lubuk Silandak ini belum pernah terjangkau apapun oleh pemerintah daerah, terutama pembangunan. Per-ekonomian masyarakat adalah 90 % dari sawit 7 % karet dan 3 % jengkol. Lubuk Silandak memiliki potensi wisata yaitu air terjunnya dan potensi PLTA”. Sementara untuk akses ke desa Lubuk Silandak kita harus menyebrang sungai dengan rakit (bambu yang sudah diikat) “Tiga tahun yang silam pernah ada sebuah jembatan yang menghubungkan antara desa Lubuk Silandak dan Bukit Makmur. Transporasi lancar. Sekarang, kami dan motor kami harus menyeberangi sungai Air Bantal dengan menggunakan rakit dengan membayar Rp 15.000 (PP) berlaku untuk hari yang sama. Sudah tiga tahun aktivitas kami bergantung pada rakit.” cerita pak Kamil dengan nada sedikit geram namun penuh harap.

Pak Kamil mantan kepala desa dahulunya. Sekarang juga masih dipanggil dengan sebutan pak kades. Bu Nurilis, istrinya menggantikan posisi pak Kamil menjadi kepala desa. Pak Kamil bercerita, cerita “patah hatinya” terhadap pemerintah. Perjuangannya bersama dengan masyarakat desa selama tiga tahun belum membuahkan hasil. Perjuangan agar pemerintah membangun kembali

jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan desa Bukit Makmur serta desa lainnya. “Beberapa kali perangkat negara datang berkunjung, dan berjanji untuk memperhatikan kami, namun kunjungan hanyalah sebatas kunjungan, dan janji sebatas janji. Kami patah hati” tuturnya melemah.

Semenjak robohnya jembatan, harga komoditas sawit dan karet milik masyarakat anjlok hingga 2 X lipat. “Buah sawit dan karet kami tidak ada harganya lagi. Sawit hanya dihargai Rp 600 per kg nya. Karet juga hanya Rp 4000 per kg. Tokke (Tengkulak) tidak mau naikin harga, katanya biaya angkutnya tinggi, karena lewat jalan alternatif lebih jauh, 11 Km dan melintasi kebun PT. Agromuko. Mereka gak mau rugi, sebenarnya kami juga gak mau rugi tapi dari pada sawit kami gak terjual ya akhirnya dengan sangat terpaksa biarlah kami yang merugi.”¹⁹

Ketika Tim dari Yayasan Genesis Bengkulu pertama kali datang untuk melakukan sosialisasi untuk program kemitraan masyarakat lubuk silandak dengan antusias menyambut baik dengan rencana tersebut. “ Kami masyarakat lubuk silandak tentu sangat senang jika ada yang mau membantu kami dalam mengurus legalitas untuk bisa mengakses pengelolaan hutan, apa lagi dengan jarak yang sangat dekat kami takut warga kami disini membuka kawasan huta tanpa izin dan akhirnya ditangkap dan kami tidak bisa mengawasi itu apalagi lahan semangin kritis disini sejak adanya PT.Agro Muko ini” Celoteh ibu Nurilis. Mendengar pernyataan tersebut Kamipun langsung membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk membentuk pengurus Kelompok tani pengelola hutan.

SP 4 Desa Bukit Makmur Kecamatan Penarik

Kecamatan Penarik merupakan salah satu daerah di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Wilayah Kecamatan Penarik memiliki luas wilayah 296,64 km², dengan ibukota kecamatan

¹⁹hasil wawancara ketua kelompok tani kabupaten muko-muko bapak Edi Mashur tanggal 25 Januari 2019 Pukul 10.00-12.00 WIB

adalah desa Lubuk Mukti. Batas-batas wilayah kecamatan Penarik adalah :

sebelah utara : Kecamatan Selagan Raya
 sebelah selatan : Kecamatan Teramang Jaya
 sebelah timur : Provinsi Jambi
 sebelah barat : Kecamatan Air Dikit

Kecamatan Penarik terdiri dari 12 desa definitif dan 2 desa persiapan. Secara geografis, semua desa terletak di daerah bukan pantai. Kecamatan Penarik keadaan topografinya dataran, pada umumnya berada di dataran. Ketinggian wilayah berkisar antara 50 – 200 meter di atas permukaan laut.

Desa SP4 Bukit Makmur biasa disebut juga SP4 Perambah, karena pada awalnya masyarakat Bukit Makmur datang ke desa tersebut melalui program transmigrasi yang datang ke kawasan tersebut secara bergelombang sejak 1982 dan 1994 dan sebagian desa SP4 Bukit Makmur merupakan HPT Air Ipuh II. Di dalam wilayah KPHM Mukomuko terdapat empat desa yang terletak pada dua kecamatan yaitu kecamatan Penarik (Desa SP4 Bukit Makmur) dan kecamatan Malin Deman. Keberadaan desa-desa ini yang merupakan desa definitif dapat memberikan tekanan yang sangat besar bagi kawasan hutan mengingat dalam memenuhi kebutuhan tanah perumahan, tanah usaha pertanian dan perkebunan dan tanah fasilitas desa mereka melakukan pembukaan kawasan hutan.

Desa Bukit Makmur atau SP4 memiliki kawasan yang berbukit-bukit. Transmigran datang ke kawasan ini sejak 1982. Program transmigrasi yang diikuti warga merupakan gabungan transmigran dari Jawa dan transmigran lokal dari Bengkulu dan Sumatera Selatan. Kawasan transmigrasi ini menjadi desa definitif pada 1995. Warga transmigran Jawa berasal dari Wonosobo sekitar 149 keluarga datang ke wilayah ini pada 1982, disusul sekitar 151 keluarga perambah hutan dari desa sekitar. Para perambah hutan ini berasal dari Sumatera Selatan. Pada 1994 mereka datang melalui skema Trans Pemukiman Perambah hutan

(Trans PPH). Awalnya luas desa sekitar 1600 hektar, kini luasnya sudah menjadi 3000 hektar. Banyak transmigran yang meninggalkan pemukiman karena kesulitan hidup di awal, khususnya setelah bantuan jadup (jatah hidup) dari pemerintah pusat berhenti setelah satu tahun berjalan. Rata-rata masyarakat disini memiliki lahan sawit itu sekitar 2 hektar yang didapat dari program transmigrasi. Seperempat hektar dipakai untuk lahan rumah dan pekarangan, sisanya sudah diubah menjadi kebun sawit. Pohon kelapa sawit bahkan ditanam di halaman-halaman rumah. Sejak terintegrasi dengan kebun sawit, tentu saja semua kebutuhan pangan bergantung kepada pasar.

Sama halnya dengan desa lubuksilandak, di desa sp4 pertama kali Genesis Bengkulu datang untuk sosialisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga disambut dengan baik masyarakat berharap Genesis bisa mendampingi mereka disana untuk perizinan perhutanan sosial. “Kami masyarakat disini sudah membuat kelompok tani sebanyak 3 kelompok masing – masing kelompok beranggotakan 30 orang jadi total keseluruhannya sebanyak 90 orang. Selama ini kami sangat khawatir dan merasa tidak tenang menggarap lahan yang sudah di buka, kerap kali kami disini disebut sebagai perambah. kami sangat berharap untuk kedepannya kami diberikan legalitas hukum dalam menggarap lahan, agar tidak ada lagi main kucing-kucingan dengan pihak pemerintah. karena selama ini itu yang terjadi. untuk jenis tanaman yang akan ditanam nanti itu tergantung kesepakatan bersama memang ada beberapa orang yang menginginkan agar ditanami sawit, tapi yang terpenting saat ini adalah kepastian hukum kami disini untuk menggarap lahan produksi yang berdekatan dengan desa ini. Setelah pertemuan itu kami sepakat untuk menambah lagi kelompok dari 3 kelompok menjadi 6 kelompok tani pengelola hutan.

Perebutan ruang kelola ini juga sejalan dengan Program Pembangunan Nasional 2015-2019 telah menetapkan target alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat. Penetapan target itu adalah sebuah lompatan besar

meski mengalami pengurangan dari rencana 40 juta hektar yang disebutkan sebelumnya dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perjuangan perebutan ruang kelola bersama rakyat ini bekerjasama dengan Multistakeholder Forestry Programme (MFP). Kegiatan ini memfasilitasi rakyat mulai dari model / Sekema pengelolaan hutan yang akan di usulkan, membangun organisasi calon pengelola, pemetaan wilayah usulan, fasilitasi usulan, fasilitasi pengakuan dan pengukuhan kawasan hutan yang akan dikelola masyarakat.

Kesimpulan

1. Pengaturan kebijakan nasional terhadap pengelolaan hutan kurang sejalan dengan Peraturan pemerintah Daerah mukomuko yang masih jauh dari sinergi dalam upaya melaksanakan kebijakan perubahan yang lebih baik lagi.
2. Hambatan pengaturan kebijakan nasional terhadap pengelolaan hutan berbasis perubahan iklim antara lain: Proses komunikasi berjalan kurang optimal, kegiatan Forkom di tingkat Kabupaten juga belum mampu menampung aspirasi masyarakat. Ditingkat Dasar masih ada miskomunikasi dari beberapa stacholder dan Sumberdaya Manusia yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan belum mencukupi.
3. Pada keterpaduan kebijakan nasional dan aspek struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan masih terkesan top-down dikarenakan kurangnya sinergi antara pemerintahan provinsi dan kabupaten.

Daftar Pustaka

- A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Abubakar Sidik Katili, Penurunan Jasa (Servis) Ekosistem Sebagai Pemicu Meningkatnya Perubahan Iklim Global, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=>
- Amiruddin A. Dajaan Imami dkk, Asas Subsidiaritas (Kedudukan & Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan), Pusat Kajian Penyelesaian Sengketa Lingkungan (PP-PSL FH UNPAD) dan Penerbit Bestari, Bandung, 2009
- Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, Model Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Bidang Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus DAS Citarum) dalam Amiruddin A. Dajaan Imami dkk (Ed), Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan, Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia, Bagian Hukum dan Pembangunan/ Masyarakat Fakultas Hukum UNPAD & Logoz Publishing, Bandung, 2013
- Astim Riyanto, Negara Kesatuan (Konsep, Asas dan Aktualisasinya), Yapemdo, Bandung, 2006
- Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya), UI Press, Jakarta, 1995
- Bab II Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Bappenas, Potret Aksi Di daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), Januari 2014
- Britannica Online Encyclopedia, www.wikipedia, diakses Januari 2019.
- Gunarto Hadi dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Vol. 9 No. 2, Juni 2011
- Harry Supriyono dan Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan, Cetakan Pertama (Jakarta : Universitas Terbuka 1996)
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- Jennifer A. Elliott, An Introduction to Sustainable Development, Second edition, Routledge, London and New York, 1999
- Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indo-

- nesia, PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994, h. 9, lihat juga Soehino, Ilmu Negara, (liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 1993)
- Johan Iskandar, Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta Gadjah Mada Pres, 2000)
- Marilang, "Keadilan antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang", Jurnal AL-FIKR Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012
- Mery Lou Roberts dan Paul D Berger (1998). Direct Marketing. Management. Prentice Hall Englewood Clift. Drs. H. Indriyo Gitosudarmo, M. Com (Hons) (1994)
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum, Binacipta (Putra A Bardin, Cetakan ke-9, 1999)
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2009
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 5-7 dan R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009
- Otto Soemarwoto, Aturdirisendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah Mada University Press, Cetakan Ketiga, 2004)
- Padmo Wahyono dalam Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas rumah Kaca (RAN-GRK).
- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development, <http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#I>, diakses 11 November 2018 jam 22.00 Wib.
- Soeharto (Presiden Republik Indonesia Kedua), Pidato Kenegaraan Republik Indonesia di depan sidang DPR-GR, pada tanggal 16 Agustus 1968
- Soerjani dalam Abdurrahman, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003
- St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I, Binacipta, Bandung, 1981
- Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010
- Sunardi, Perlindungan Lingkungan: Sebuah Perspektif dan Spritualitas Islam, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan – Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008
- Susi Dwi Harijanti, Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Susi Dwi Harijanti dkk (ed), Negara Hukum yang Berkeadilan, Kumpulan tulisan dalam rangka Purnabakti Prof Dr. H. Bagir Manan, SH. M.Cl, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2011
- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan

- Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
- Untung Iskandar dan Agung Nugraha, Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Issue dan Agenda Mendesak), Debut Press, Yogyakarta, 2004
- Wartiningsih, Pidana Kehutanan: Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan, Setara Press, Malang, 2014
- [http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/pidato-kehegaraan-tahun-1968/? & kid= 1413242931](http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/pidato-kehegaraan-tahun-1968/?&kid=1413242931) 14/ 10/ 2017
- [https://bengkulu.antaranews.com/perkebunan sawit kuasai 41 persen luas Mukomuko](https://bengkulu.antaranews.com/perkebunan-sawit-kuasai-41-persen-luas-Mukomuko) (di akses tanggal 23 Mei 2018 Pukul 10.00)